

MEMBUKA RUANG BERSAMA!

Tampaknya, ketidaksejajaran, ketidaksesuaian, ketumpang-tindian, masih menjadi keluhan banyak orang dalam membicarakan organisasi masyarakat Islama terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama. Setidaknya, diksi-diksi itu muncul dari seorang Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Endang Turmudi yang diwawancarai Hamzah Sahal.

Ketika Ufi Ulfiah mewawancarai Maria Ulfah Anshor pun, kata-kata yang mewakili kegagalan itu juga meluncur dengan deras dari lisan Ketua Umum Fatayat NU itu. Membaca wawancara mereka rasanya amat getir, utamanya bagi orang-orang yang sudah merasa bekerja keras untuk organisasi. Tapi inilah kenyataannya.

Berita-berita, diskusi-diskusi, obrolan-obrolan di tengah-tengah jama'ah NU yang menyangkut perkara *pelanggaran*, pakem, sistem, dalam akhlak ber-NU sebagai jam'iyah, semakin menguatkan 'pemandangan' bahwa NU belumlah menjadi organisasi yang kokoh. Tema peran ulama atau kiai, Khittah 1926, NU dan politik, tema rangkap jabatan, tema masa jabatan, mekanisme pengambilan keputusan masih banyak mengemuka menjelang Mukhtamar NU ke-32 di Makassar, akhir Maret ini.

Satu contoh kecil. Dalam wawancara, Endang yang pekerjaan utamanya sebagai peneliti di LIPI, mengungkapkan bahwa PBNU kesulitan mengkordinir organisasi otonom yang berada di lingkungan NU, rapat-rapat koordinasi tidak berjalan. Dan walaupun ada, yang

datang dalam ruang rapat adalah orang-orang pengganti, bukan orang utama yang wajib datang.

Maria Ulfah Anshor, Ketua Umum PP Fatayat NU, justru mengatakan yang sebaliknya. Dengan menunjukkan contoh-contoh, Maria Ulfah mengatakan bahwa PBNU tidak melakukan upaya-upaya menggapai soliditas dalam tubuh NU. Ketidakteraturan, kata Maria Ulfah, didiamkan.

Tentu saja, ini sebuah ironisme. Sebab, di usia yang sudah kepala delapan ini dan enam belas tahun lagi seabad, mustinya NU makin dewasa. Kenyataan ini makin miris ketika kita melihat organisasi-organisasi Islam tapi eksklusif, yang kecil tapi agresif, lahir di Indonesia tapi kasar dengan keindonesiaan, dengan serba kebhinekaan yang sudah menjadi karakter negeri ini.

Problem-problem keorganisasian yang sudah dialami dan sedang dialami NU akan menjadi penghalang bagi misi keislaman yang rahmatan lil 'alamin, bagi madzhab Ahlul-sunnah wal Jama'ah yang berwatak tawazun, tasahmuh, tawasuth, dan i'tadul. Dan, kalau problem-problem itu tidak segera dipecah, konsentrasi NU dalam menjaga NKRI akan porak-poranda, negara bangsa yang akan rugi. Artinya, mengatasi perkara teknis organisasi adalah hal yang teramat serius, bahkan mungkin bisa pada level *dlorurot*.

Satu hal yang penting dalam menjaga keutuhan NU, dan harus diberikan pada jama'ahnya, yaitu membuka ruang bersama! (*hamz.*)

Endang Turmudi:

TIDAK SEKEDAR PINTAR INI, PINTAR ITU...



Pak Endang, sudah berapa lama Anda jadi pengurus PBNU?

Ya kalau PBNU saya baru lima tahun ini. Sebelumnya saya di Ma'arif (Lembaga Pendidikan Ma'arif, red.).

Selain di Lembaga Pendidikan Ma'arif di mana?

Sebelumnya saya di PMII. Pengkaderan dalam PMII itu menjadi bekal.

Menurut Anda, apa kriteria dasar jadi pengurus NU?

Sekarang ini muncul wacana dari kawan-kawan bahwa untuk menjadi

pengurus NU harus mempunyai pengalaman di lembaga. Saya kira ini penting, biar tidak tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal masuk jadi pengurus NU gitu.

Kalau boleh tahu, bagaimana proses Anda menjabat jadi Sekjen PBNU?

Wah! Itu saya *gak* tahu itu. Pokoknya saya dipanggil. Orang-orang tahu karena saya aktif di Ma'arif, kemudian sedikit dikenal itu saja barangkali.

Apa program PBNU selama lima tahun terakhir ini?

Yang pertama begini. Program-program yang diamanatkan oleh muktamar itu ada sepuluh program dasar, mulai dari meningkatkan kualitas SDM sampai pada keterlibatan NU dalam pelayanan sosial. Sepuluh program dasar muktamar itu kemudian dipecah ke dalam program-program strategis. Program strategis itu oleh PBNU kemudian dibagi pada lembaga-lembaga sebagai pelaksana program.

Nah, lembaga itu merinci program strategis itu ke dalam kegiatan-kegiatan. Jadi saya coba buat urutan. Misalnya program peningkatan SDM. Maka kita mandatkan pada Lakpesdam, lembaga yang mengurus SDM. Kemudian Lakpesdam merincinya ke dalam bentuk kegiatan. Tapi, di samping itu tentu saja kita punya pro-

gram-program yang di luar muktamar. Artinya tidak tercantum ke dalam muktamar, tapi kita perlu lakukan itu. Misalnya berkaitan dengan situasi yang muncul, ada pendidikan politik kebetulan Lakpesdam melakukan itu. Kemudian misalnya ada soal lingkungan, kemudian ada soal penanganan bencana. Ini bagian misalnya kita didik anak-anak NU untuk bisa menangani program ini. Bencana itu kan langsung praktek. Jadi intinya programnya itu.

Prosesnya bagaimana Pak, hingga Ma'arif ataupun LDNU itu mengimplementasikan di lapangan?

Jadi kami dari PBNU hanya mencoba mengalokasikan program strategis itu. Nah, kemudian nanti masing-masing lembaga itu merinci ke dalam bentuk kegiatan. Nah kegiatan itu akan dilaporkan oleh mereka ke PBNU, begini-begitu. Oke, kalau gitu tinggal dilaksanakan. Kemudian ketika pelaksanaan sebagian dengan koordinasi dengan ketua yang membidani mereka, mereka melaksanakan program itu.

Pak Endang, dari sepuluh program dasar itu, apa unggulannya?

Ada tiga. Satu pendidikan. Yang kedua pengembangan ekonomi umat. Yang ketiga kesehatan. Nah, alhamdulillah terutama pendidikan dan kesehatan itu berjalan lebih bagus. Jadi kegiatan-kegiatannya sesuai dengan yang kita harapkan. Memang pengembangan ekonomi agak tersendat-sendat.

Seperti apa bagusnya Pak dan di mana? Tersendat-sendatnya di mana, di bidang apa?

Paling tidak begini, dari sisi kegiatan dilaksanakan. Misalnya Ma'arif melakukan

kegiatan cukup banyak. Jadi misalnya ada pelatihan guru bidang. Kemudian ada apa lagi gitu. Kemudian LPK (Lembaga Pelayanan Kesehatan, red.) itu juga demikian. Ekonomi tidak sebanyak kedua lembaga pelaksana program itu. Jadi secara gampang kita melihat dari kuantitas kegiatannya.

Nah memang kalau soal apakah kegiatan itu kena sasaran itu kan perlu monitoring. Kita masih lemah dalam hal monitoring. Soal kesulitannya saya kira utama adalah dana. Pelaksanaan program itu dana yang paling sulit. Karena terus terang PBNU tidak bisa membekali dana. Jadi danya cari sendiri kami. PBNU siap memfasilitasi berupa otoritas. Jadi misalnya dana itu bisa dicari melalui kerjasama, maka kita dukung apa yang harus dilakukan oleh PBNU agar kerjasama itu berjalan. Jadi seputar itu, karena kita tidak mempunyai dana. Jadi misalnya ini lembaga kamu punya progman ini, ini dananya, jadi tidak seperti itu.

PBNU sendiri punya program apa Pak?

Nah itu kan gini. Terutama harus diingat, lembaga itu kan fungsinya departementasi. Oleh karena itu memang departemen ini dan pelaksana programnya itu di bawah koordinasi salah seorang ketua di PBNU. Jadi misalnya Pak Mustofa Zuhad. Dia kan mengawasi bidang-bidang yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi itu. Jadi dia koordinasi dengan lembaga perekonomian NU. Kemudian ada Pak Masdar (Masdar Farid Mas'udi, red.). Dia itu yang berkaitan dengan Ma'arif. Kemudian yang lain-lainnya juga begitu. Jadi di antara tugas para ketua itu mengkoordinir, memonitor pelaksanaan program oleh lembaga.



Bagaimana memastikan organisasi itu berjalan sesuai rencana?

Nah Itu kan biasanya begini. Pertama tergantung kepada lembaga yang bersangkutan. Artinya begini, kan tidak semua lembaga melaksanakan program itu secara mulus, karena punya masalah-masalah, soal pendanaan, dan lain-lain. Koordinasi dengan PBNU ketika melaksanakan program itu, komunikasi dengan ketua yang sudah ditentukan. Karena ketua itu biasanya langsung juga menjadi penasehat dalam lembaga itu jadi fungsi penasehat dan langsung koordinasi di sana gitu. Kemudian nanti memang ketua melaporkan dalam rapat-rapat PBNU gitu secara insidental dalam rapat-rapat kegiatan sejauh ini. Kemudian kita juga punya rapat yang juga eksidental undang semua lembaga-lembaga untuk memberikan laporan. Misalnya tengah tahunan kita undang lembaga untuk koordinasi apa yang telah dilakukan oleh mereka, disamping mereka juga memberikan laporan berbentuk kegiatan.

Itu rutin, Pak? Lima tahun terakhir ini, sudah berapa kali rapat dengan lembaga-lembaga?

Kita biasanya melakukan per enam bulan. Meskipun dalam pelaksanaannya itu

tidak enam bulan. Kadang-kadang molor gitu. Tapi komunikasi dengan lembaga itu memang melalui rapat koordinasi itu.

Pak Endang, bagaimana dengan badan otonomi?

Kalau banom-banom itu memang agak sulit. Karena memang fungsi dan posisinya banom itu kan di luar NU, dalam tanda petik lho ya. Mereka bukan pelaksana program PBNU. Secara otoritatif kita memang tidak memberikan otoritas kepada mereka. Kita memang tidak memberikan program itu kepada banom, badan otonomi. Banom itu punya program sendiri. Karena mereka otonom, dipilih oleh masyarakatnya. Kemudian menentukan program sendiri. Tetapi memang ini program NU itu harus menjadi payung juga untuk banom-banom. Jadi harus selalu merujuk pada program NU yang ditentukan oleh muktamar. Paling tidak jika mungkin mereka melaksanakan program NU *break down* ke dalam kegiatan-kegiatan dan yang terpenting, jangan sampai ada program yang bertentangan dengan PBNU.

Selama ini mulus-mulus saja atau ada yang bertentangan?

Pada umumnya tidak ada masalah. Hanya begini, kita sering mendengar ada program atau kegiatan yang dilakukan banom yang kadang-kadang mendapat sorotan PBNU. Biasanya itu program-program yang berkaitan atau bersentuhan dengan masalah-masalah keagamaan.

Apa contohnya?

Jadi kan begini. Saya hanya mendapat laporan Fatayat misalnya, melakukan program berkaitan dengan aborsi. Ada kesan

seolah-olah Fatayat memfasilitasi orang-orang untuk melakukan aborsi. Saya tidak tahu persis programnya, apa itu yang dilakukan Fatayat terkait dengan aborsi begitu, tetapi suara yang muncul begitu. Maksud saya, masalah-masalah yang bersentuhan dengan masalah agama, kita kan sudah punya koridornya. Jadi pikiran-pikiran NU tentang hal-hal tertentu itu harus menjadi koridor untuk program-program itu. Meskipun pikiran-pikiran itu belum terumuskan secara tegas. Memang agak sulit, apakah pikiran itu masih berada pada koridor atau *gak*? Tapi yang penting itu dikonsultasikan. Tentang agama kita punya syuriah di PBNU.

Bagaiman Anda sebagai Sekjen tidak tahu?

Memang mekanisme dengan banom kan umum saja. Memang belum diatur secara rinci *gitu lho*.

Relasi keorganisasiannya?

Jadi misalnya mesti harus ada peraturan, katakanlah banom dalam setiap sekian bulan harus memberikan laporan misalnya. Itu *gak* ada secara tertulis. Memang harus dibuat, dengan kesepakatan, dengan mereka. Karena mereka independen *gitu*, dalam tanda petik.

Sampai hari ini ada usaha-usaha itu Pak?

Ada, ada. Jadi misalnya kita melakukan rapat koordinasi kira-kira tahun lalu, atau 2 tahun tahun lalu ya, saya lupa. Mereka tidak semuanya hadir. Yang hadir juga bukan ketua umumnya, padahal kita juga ingin membicarakan bagaimana koordinasi antara PBNU dengan banom, kemudian kuatlah garisnya atau apa atau apa, *gitu loh*.

Jadi memang ada kesulitan. Memang harus dibuat, ke depan ini harus jadi catatan, buatlah mekanisme hubungan dengan banom. Tentu saja, supaya gerak banom berada dalam koridor NU. Tentu saja NU sebagai nilai, kalau sebagai organisasi mungkin terasa terlalu mengikat. Ya, paling tidak secara nilai.

Semacam manhajul fikr?

Nah begitu. Ada pikirannya.

Ada kejadian begini, Pak Hasyim mengkritik PMII atau Ansor. Itu bagaimana Pak?

Betul itu tadi miss komunikasi. Muncul karena kita memang tidak mempunyai mekanisme. Jadi mekanisme yang muncul adalah mekanisme kritik. Mekanisme itu harus dibuat sedemikian rupa diwujudkan dalam bentuk aturan atau kesepakatan, dimana setiap masalah yang muncul itu dibahas didiskusikan begitu. Jadi misalnya katakan Ansor melakukan satu aktivitas yang tidak sesuai. Kan bisa kita panggil duduk bareng *gitu*, kan jadi itu dasarnya aturan, kesepakatan *gitu*. Nah kalau sekarang itu kan susah banom itu. Banom dipanggil sama Sekjen saja itu *gak* datang.

Banom dipanggil Sekjen gak datang pak?

Gak datang mereka. Buktinya mereka diajak rapat saja *gak* datang. Yang datang hanya orang nomor dua atau nomor tiganya di banom. Ke depan memang harus dirumuskan itu, dirumuskan kesepakatan karena sebetulnya banom posisinya itu anak kandung. Jadi memang posisi mereka tidak bisa melebihi PBNU. Cuman karena tidak ada mekanisme yang

tegas, akhirnya kesulitan-kesulitan muncul. pragmatisme. Sikap ini bikin repot.

Selain dana, Pak, apa problem lain? Rekrutmen atau apa?

Saya kira memang betul, dari sisi rekrutmen itu juga harus diperhitungkan. Begini, merekrut itu harus mempertimbangkan, orang itu tidak sekedar pintar ini pintar itu, tapi dia mau *gak* bekerja melaksanakan program NU. Kalau pintar tidak melaksanakan program *ngapain*. Kemudian juga mungkin semangat dan komitmen ke-NU-an harus dipunyai oleh para ketua lembaga sebagai pelaksana.

Ada indikasi rendahnya komitmen tidak selama ini

Kalau komitmen dengan NU itu tetap kuat. Cuman melaksanakan program itu lho? Itu saja yang saya lihat. Mungkin mereka itu tidak punya dana, sulit mencari dana.

Apa harapan Anda lima tahun, sebagai Sekjen?

Saya kira yang saya harapkan soal kaderisasi. Ini tentunya tugas Lakpesdam ke depan. Nah, kaderisasi itu berkaitan dengan baik pembinaan karakter kepemimpinan secara umum maupun bagian dari pembinaan fanatisme ke-NU-an secara khusus. Sekarang kaderisasi tidak begitu intens.

Pengalaman Anda menjadi Sekjen bagaimana Pak?

Saya kira kesulitan-kesulitan yang biasa. Ya itu tadi, salah satunya kaderisasi tidak berjalan dengan semestinya. Jadi misalnya pengurus wilayah atau cabang bukan kader yang terdidik melalui pengkaderan itu memunculkan masalah, apalagi sekarang muncul sikap-sikap

Apa suka dukanya menjadi Sekjen PBNU organisasi terbesar di Indonesia?

Saya kira sukanya saya bisa mengabdikan tenaga saya. Dukanya biasanya, namanya saja organisasi. Organisasi itu kan punya aparatur yang dari sisi pengetahuan dan pengalaman tidak sama, dari sisi habit juga tidak sama. Kan itu memerlukan keberanian untuk melakukan sesuatu.

Kerjaan Anda di LIPI bagaimana, Pak?

Jalan. Untungnya saya peneliti, punya waktu yang tidak terlalu terikat. Sehingga waktu saya relatif banyak sesuai tugas saya sebagai Sekjen, untungnya itu. Kalau saya birokrat murni itu kan repot.

Seminggu berapa kali ke PBNU?

Saya bisa dikatakan tiap hari di sini. Tapi kerjaan saya di LIPI jalan. Kadang-kadang pagi saya ke LIPI. Habis makan siang saya ke sini. Tetapi kalau di sini sibuk, saya lebih banyak di sini, jam 10 sudah di sini.

Produktifitas sebagai peneliti bagaimana Pak?

Ya tentu saja tidak full, karena sebagian waktu saya terkuras untuk menyiapkan hal-hal teknis, waktu membaca saya juga berkurang. Tentu ini tidak masalah bagi saya, saya masih menulis, tetap membaca.

Lima tahun terakhir ini apa tulisannya pak

Kalau hasil penelitian itu normal-normal saja. Saya tahun lalu melakukan penelitian tentang korupsi. Kemudian saya juga melakukan penelitian tentang anarkisme mahasiswa.